

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwahidi, M. R., & Darwanis. (2019). Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis *Website* Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol 4(1), 153-161.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Kependudukan [online]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab1>. [Diakses 21 Oktober 2019]
- Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan. (2019). Realisasi APBD [online]. Tersedia: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/tabel2>. [Diakses 21 Oktober 2019]
- Fitra, H. (2018). Penggunaan Laporan Keuangan Untuk Melihat Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kotamadya di Pulau Sumatera . *Jurnal WRA*, Vol. 6(1) .
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, U. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *JAI*.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22(1), 25–33.
- Idris, A. L., Surasni, N. K., & Irwan , M. (2018). The Determinant Disclosure Of Internet Financial Reporting In District and City Government In Indonesia. *Int.J.Eco. Res*, Vol.9 i1, 62–74.
- Indonesia. (2019). Province [online]. Tersedia: <https://www.indonesia.go.id/province>. [Diakses: 21 Oktober 2019]

Khasanah, U. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). *JAI - Jurnal Akuntansi Indonesia*.

Kompasiana (2011). Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Aktivitas dari Hulu sampai ke Hilir [online]. Tersedia :  
<https://www.kompasiana.com/andichairilfurqan/55010787a333113e0951112d/penyajian-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-aktivitas-dari-hulu-sampai-ke-hilir>. [Diakses : 13 Februari 2020]

Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori & Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pres.

Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2016). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah *Via Website*. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*.

Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *ASSETS, Volume 7(1), 56-68*.

Nurtari, A., Fadilah, S., & Nucholisah, K. (2016). Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. *Prossiding Akuntansi, Vol. 2(1)*.

Pandasari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1979-6471. Vol 19(3)*.

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- Prasasti, A. M., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Opini Audit, Tingkat Kemandirian dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)* Vol. 9(2), 94-103.
- Pratama, K. A., Werastuti, D. N., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3, No 1*.
- Prima,W., & Verawaty. (2018). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui Government di Sumatera Bagian Selatan. *Seminar Nasional Global Competitive Advantage*.
- Priyastiwi & Saputra, N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Karakteristik Daerah Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Seminar Nasional & Call Of Paper*.
- Rahayu, A., & Mardiana , A. (2016). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Pada LKPD Kabupaten/Kota Pada Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. Vol. 1(1)*
- Sekaran, U. (2014). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* . Jakarta: Empat Salemba.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiyatko, W., & Ratnaningtyas, S. (2017). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017*. Jakarta : Transparency International Indonesia.

- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan (Edisi ketiga)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Verawaty. (2015). Determinant Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah. *Eprints Binadarma*
- Verawaty. (2017). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. *AKUISISI/ Journal of Accounting & Finance*, Vol 13(2), 92-107.
- Wau, I., & Ratmono. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Acoounting*. Vol 4(4), 1-12.
- Yustikasari, Y. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada *Website* Pemerintah Daerah. *Jurnal Profita*. Vol. 11(1), 34-52.